

ANALISIS PEMBIAYAAN PEREMAJAAN KEBUN KELAPA SAWIT RAKYAT KOPERMAS TUAH MEUSAPAT MELALUI DANA SKIM HIBAH BPDP SAWIT INDONESIA DI KABUPATEN ACEH BARAT

Aswin Nasution

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar
nasution_aswin@yahoo.co.id

ABSTRACT

The Indonesian government established PP. Number 24 Year 2015 about Plantation Funds Funding and Prepres No. 61 Year 2015 about the Collection and Use its funds from the collection of export of CPO and its derivatives. The collection and management funds conducted by Indonesian Oil Palm BPDP. Results of research conducted that Tuah Meusapat Kopermas that will do the rejuvenation of oil palm plantation using BPDP oil palm grant shows that rejuvenation farmers oil palm plantation 400 hectare are use oil palm BPDP Rp. 25,000,000,- and sharing of farmers funds Rp. 35,000,000, - per hectare with total rejuvenation fund of Rp. 24,000,000,000, - per 400 hectare. Three alternative funding schemes show : 1) Skim-I 100% farmer's funds Rp. 35,000,000, - per hectare, requirement of Rp. 60,000,000, - per hectare; 2) Skim-II 50% farmer's fund Rp. 17,500,000, - and 50% bank credit Rp. 17,500,000, - interest annuity bank during construction 12% Rp. 6,917,656, -, I requirement Rp. 66,917,656, - per hectare; and 3) Skim-III farmers fund 100% of banking credit Rp. 35,000,000, - interest annuity bank during construction 12% Rp. 13,835,311, -, the total requirement of Rp. 73,835,311, - per hectare. The three funding schemes have equal opportunities to be implemented, but depends on the financial capacity of farmers. The base of project feasibility on NPV, IRR, B / C Ratio, Payback Period and BEP the products creterias the three schemes are feasible.

Keyword: BPDP Oil Palm, Grants, Sharing and Project Feasibility

PENDAHULUAN

Bagi Indonesia CPO merupakan salah satu produk unggulan perkonomian sektor perkebunan, karena CPO merupakan salah satu produk tanaman kelapa sawit yang memenuhi persyaratan sumber daya alam tangguh dan berkelanjutan. Ketangguhan ini dicirikan dengan keberadaannya yang cukup melimpah serta dapat dieksploitasi dengan mengandalkan teknologi setempat dan merupakan sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) karena kecocokan dengan lahan, lingkungan dan iklim setempat. Keberadaan sumberdaya alam tersebut tidak dapat digantikan dengan produk lain yang lebih murah dan produk turunannya mudah habis sehingga harus terus diproduksi untuk mencukupi permintaan.

Pada tahun 2014 dengan luas 10 juta Ha kebun kelapa sawit, Indonesia memproduksi 29 juta ton CPO dan menguasai 53 % produk CPO dunia, dengan volume ekspor 20,43 juta ton CPO dan turunannya yang memberikan devisa negara sebesar 21,1 milyar US\$. Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia memacu pengembangan areal perkebunan kelapa sawitnya (Anonymous a, 2016).

Dalam mengatur perkelapa sawitan di dalam negeri pemerintah menetapkan beberapa regulasi diantaranya adalah PP No. 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan dan Perpres No. 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Regulasi yang diberlakukan tanggal 25 Mei 2015 ini mengatur

penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit dari pelaku usaha. Dengan terbitnya regulasi ini pemerintah melakukan pemungutan dana kelapa sawit, CPO dan turunannya yang diekspor dengan besaran antara US\$ 10 – 50 per ton. Adapun mekanisme pungutan dana perkebunan dan Bea Keluar (BK) sesuai ketentuannya adalah jika harga CPO tidak lebih dari US\$ 750 per ton maka hanya dipungut dana perkebunan sedangkan jika harga CPO lebih dari US\$ 750 per ton maka dipungut dana perkebunan dan bea keluar. Selanjutnya kutipan dana perkebunan ini dikelola oleh suatu Badan Layanan Umum yang bernama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP Sawit (Prawita, 2015).

Pengelolaan dana perkebunan oleh lembaga ini prinsipnya akan digunakan untuk kepentingan kemajuan perkebunan kelapa sawit dengan konsep dari sawit untuk sawit. Kegiatan tersebut antara lain untuk stabilitas dan pengembangan pasar sawit, peremajaan tanaman, sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia dan pendidikan, penelitian dan pengembangan serta promosi dan advokasi. Dari berbagai kegiatan tersebut program utama dari penggunaan dana sawit adalah peremajaan perkebunan rakyat serta pembangunan sarana dan prasarana untuk pemberdayaan petani kecil (Anonymous b, 2016)

Peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat sebagai salah satu program BPDP Sawit dilakukan dengan memberikan hibah dana peremajaan kepada petani kelapa sawit sebesar Rp. 25.000.000,- per Ha. Namun dana ini tidak cukup untuk total kebutuhan dana peremajaan sampai tanaman menghasilkan yang jumlahnya mencapai Rp. 60.000.000,-. Untuk itu

petani harus menyiapkan dana lain sebesar Rp. 35.000.000,- dalam mencukupi kebutuhan dana peremajaan, baik seluruhnya dari dana sendiri, 50 % dari dana sendiri dan 50 % dari kredit perbankan atau 100 % dana sharing berasal kredit perbankan (Anonymous b, 2016).

Melakukan perhitungan biaya peremajaan kelapa sawit dari beberapa skim hibah sangatlah penting, karena ini menyakut dengan perencanaan keuangan yang akan digunakan. Menurut Fahmi (2014) perencanaan keuangan merupakan kajian tentang penempatan uang yang akan digunakan sehingga memberikan panduan bagi perubahan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan. Selain itu perencanaan keuangan juga akan memberikan gambaran kondisi – kondisi yang mungkin akan terjadi sehingga pelaku bisnis dapat memilih kondisi mana yang layak untuk dilaksanakan dan memberikan arahan pada perjalanan bisnis yang baik atau bisnis yang tumbuh berkembang.

Sumber sharing dana petani dan skim hibah yang ditetapkan BPDP Sawit tentunya memerlukan perhitungan yang tepat. Dimana perhitungan ini nantinya akan berhubungan dengan permohonan dana hibah pada BPDP Sawit, kredit pada perbankan dengan mengkalkulasikan biaya penanaman dan perawatan kelapa sawit serta beban bunga kredit pada skim hibah yang berbeda dalam suatu perencanaan keuangan yang komperhensif. Perhitungan perencanaan keuangan berhubungan dengan skim hibah yang akan dipilih petani tentu menjadi masalah, karena minimnya pengetahuan untuk melakukan perhitungan tersebut. Maka di sinilah peran penelitian untuk menghitung

perencanaan hibah dengan beberapa skim yang akan dipilih nantinya

Kabupaten Aceh Barat memiliki luas tanaman kelapa sawit rakyat dengan posisi tanaman belum menghasilkan 2.305 Ha, tanaman menghasilkan 4.361 Ha dan tanaman rusak 394 Ha. Dari tanaman menghasilkan 20 % diantaranya sudah layak untuk diremajakan sehingga total luas kebun kelapa sawit rakyat layak diremajakan 1.266 Ha (Dishutbun Aceh Barat, 2015).

Koperasi Peran Serta Masyarakat atau Kopermas Tuah Meusapat adalah salah satu koperasi aktif yang ada di Kabupaten Aceh Barat. Koperasi ini beranggotakan petani yang memiliki lahan kelapa sawit sudah layak di remajakan. Melihat peluang program revitalisasi perkebunan kelapa sawit melalui bantuan peremajaan yang disiapkan pada BPDP sawit, maka petani Kopermas Tuah Meusapat berencana memanfaatkan dana bantuan tersebut.

Akan tetapi sebagaimana petani pada umumnya, petani kelapa sawit Kopermas Tuah Meusapat adalah kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan perhitungan perencanaan keuangan secara detail apalagi dengan beberapa pola skim yang berbeda. Namun di sisi lain perhitungan ini diperlukan untuk mendapatkan hibah dana peremajaan yang tersedia. Oleh karena itu perlunya penelitian ini dilakukan untuk menghitung skim hibah Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) dalam beberapa pola skim yang berbeda tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah perhitungan beberapa skim hibah BPDP Sawit

untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat.

- b. Pola skim manakah yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan.
- c. Layakkah peremajaan perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan.

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melakukan perhitungan beberapa skim hibah BPDP Sawit untuk peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Mendapatkan pola skim yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan.
- c. Mengetahui kelayakan peremajaan perkebunan kelapa sawit tersebut dilakukan

METODOLOGI PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2016 di Kabupaten Aceh Barat tepatnya pada Kopermas Tuah Meusapat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja sehubungan dengan Kopermas Tuah Meusapat sedang mengajukan dana peremajaan kelapa sawit dari BPDP Sawit untuk lahan seluas 400 Ha di Kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat.

Metoda Pengumpulan dan Analisa Data

Metoda pengambilan data yang digunakan adalah metoda survey dengan jenis data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui pendekatan sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap izin dan legalitas koperasi, kesesuaian lahan berdasarkan pada kondisi sifat dan spesifikasi tanah, iklim, topografi, land scape, sumber air, akses sarana dan lain – lain.

- b. Tingkat produksi tandan buah segar (TBS) pada berbagai kelas lahan (tingkat produksi lahan, berbagai harga masukan yang harus dikeluarkan untuk peremajaan tanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, berbagai dampak eksternal (negatif) terhadap lingkungan, dan nilai-nilai yang tidak dapat dihitung (*intangible values*)
- c. Penelitian terhadap perencanaan peremajaan dan sumberdaya yang tersedia serta kondisi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di sekitar proyek sebagai penampungan dan penentu harga produksi Tandan Buah Kelapa Sawit (TBS) yang dihasilkan.

Metoda Analisa Data

- a. Mengidentifikasi faktor perizinan dan kelayakan lahan untuk peremajaan kelapa sawit.
- b. Mengembangkan perhitungan dalam suatu lembaran kerja (*spreadsheet* dengan menggunakan *Excel*) sehingga memungkinkan untuk melakukan penyesuaian variabel secara fleksibel. Semua perhitungan nilai variabel biaya dan manfaat proyek dilakukan dalam satuan per unit (per hektar).
- c. Melakukan analisis perkiraan terhadap biaya potensial yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat beberapa pola skim hibah yang ditawarkan.
- d. Melakukan model analisis kelayakan investasi yang antara lain :

Net Present Value (NPV)

NPV suatu proyek adalah manfaat bersih yang diperoleh selama umur proyek. Kriteria dan keputusan dalam analisis ini adalah layak jika $NPV > 0$ sedangkan bila $NPV < 0$, usaha tersebut tidak layak untuk di usahakan (Jumingan, 2011). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct}{(1 + i)^t}$$

Dimana :

- NPV = Nilai Net Present Value
- Bt = Manfaat pada tahun t
- Ct = Biaya pada tahun t
- i = Tingkat suku bunga
- n = Umur ekonomis proyek
- t = Waktu

IRR (Internal Rate of Return)

IRR adalah tingkat pengembalian internal selama umur proyek. IRR merupakan *discount rate* yang menjadikan manfaat bersih sekarang sama dengan nol. Nilai IRR yang lebih besar atau sama dengan *discount rate* yang telah ditentukan, maka usaha layak dilaksanakan sedangkan jika IRR lebih kecil dari *discount rate* yang telah ditentukan, maka usaha tidak layak untuk dilaksanakan (Jumingan, 2011). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$IRR = i_1 + \frac{NPV_1}{NPV_1 - NPV_2} (i_2 - i_1)$$

Dimana :

- IRR = Nilai IRR
- i_1 = *Discount rate* yang menghasilkan NPV positif
- i_2 = *Discount rate* yang menghasilkan NPV negatif
- NPV1 = NPV yang bernilai positif
- NPV2 = NPV yang bernilai negatif

Net B/C (Net Benefit Cost Ratio)

Net B/C merupakan perbandingan antara NPV total dari manfaat bersih terhadap total dari biaya bersih. Metode ini digunakan untuk melihat berapa besar manfaat bersih yang dapat diterima suatu proyek untuk setiap investasi yang dikeluarkan. Bila Net B/C lebih besar

sama dengan 1 usaha dianggap layak untuk dilaksanakan dan jika B/C kurang dari 1 maka usaha tidak layak untuk dilaksanakan (Jumingan, 2011). Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Net\ B/C = \frac{\sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct}{(1+i)^t}}{\sum_{t=1}^n \frac{Bt - Ct}{1+i^t}}$$

(Untuk $Bt - Ct > 0$)

(Untuk $Bt - Ct < 0$)

Di mana,

Net B/C= Nilai B/C Ratio

Bt = Total penerimaan pada tahun ke-t

Ct = Total biaya pada tahun ke-t

i = Tingkat diskonto yang berlaku

n = Umur ekonomi proyek

Payback Period

Payback Period merupakan salah satu metode dalam menilai kelayakan suatu investasi, yang digunakan untuk mengukur periode pengembalian modal. Dasar yang digunakan untuk perhitungan adalah aliran kas (*Net Cashflow*). Semakin kecil angka yang dihasilkan mempunyai arti semakin cepat tingkat pengembalian investasinya, maka usaha tersebut semakin baik untuk dilaksanakan (Kasmir, 2010). *Payback period* dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Payback\ Period = \frac{Nilai\ Investasi}{Manfaat\ Bersih\ rata - rata}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kopermas Tuah Meusapat

Kopermas Tuah Meusapat merupakan koperasi aktif di Kabupaten Aceh Barat yang beralamat di jalan Singgah Mata II Jurung VI Gampoeng Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Mulaboh Kabupaten Aceh

Barat. Sebagai pengelola kegiatan peremajaan perkebunan koperasi ini memiliki anggota koperasi pemilik kebun yang akan diremajakan seluas 400 Ha yang berada di kecamatan Woyla Timur Kabupaten Aceh Barat. Kebun kelapa sawit petani ini layak diremajakan karena rata – rata sudah berumur di atas 20 tahun atau tahun tanam 1996 – 1997.

Menurut Pahan (2010) dan Sunarko (2013) tanaman kelapa sawit sudah layak diremajakan pada umur 20 tahun dan jika sudah berumur diatas 25 tahun tanaman sudah tidak layak diusahakan secara ekonomis, hal ini karena selain produksinya sudah jauh menurun proses panen yang dilakukan juga sudah sulit karena tanaman sudah tinggi.

Sebagai sebuah badan usaha Kopermas Tuah Musapat memiliki legalitas perizinan antara lain : a) Pengesahan Akta Pendirian Kopermas Tuah Meusapat Nomor: No. 62/BH/KDK. 1.6/V/1999 tanggal 12 Mei 1999; b) Akta Perubahan Pendirian Kopermas Tuah Meusapat No. 05 tanggal 09 Oktober 2012 pada Notaris Tueswandi Second Putra, SH; c) Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Kopermas Tuah Musapat Nomor: 17/BH/PAD/1.1/X/Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012; d) Situ : No. 497/503/ 02-KPPT/XI/2015 tanggal 06 Nopember 2015; e) TDP: No. 01062600068 tanggal 06 Nopember 2015; f) S I U P : No. 418/01-06/PK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012; g) NPWP : 01.533.366.9-103.000; h) Ketua koperasi Amran Chandra. Pada kegiatan program peremajaan kelapa sawit ini Kopermas Tuah Meusapat telah mendapatkan rekomendasi dari DPW Apkasindo Aceh dan DPD Apkasindo Kabupaten Nagan Raya dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Aceh Barat.

Secara geografis areal peremajaan perkebunan kelapa sawit Kopermas Tuah Meusapat seluas 400 Ha ini berada di kecamatan Woyla Timur kabupaten Aceh Barat pada posisi antara 96°03'30'' dan 96°04'00'' Bujur Timur serta 4°28'00'' dan 4°28'30'' Lintang Utara. Selanjutnya jika ditinjau dari kesesuaian lahan untuk tanaman kelapa sawit lokasi ini memiliki kesesuaian lahan kelas S1 (Sangat sesuai), S2 (cukup sesuai) dan sedikit S2 (sesuai terbatas), sehingga perencanaan produksi akan mengikuti rata-rata produksi pada tiga kesesuaian lahan tersebut.

Menurut Sutarta dan Rahutomo (2010) dan Pahan (2010) produksi tanaman kelapa sawit akan mengikuti kelas kesesuaian lahan penanaman kelapa sawit. Semakin sangat sesuai kelas lahannya maka akan semakin tinggi produksi kelapa sawit yang dihasilkan dan semakin rendah input produksi yang harus diberikan pada lahan dan tanaman, akibatnya keuntungan yang diperoleh akan semakin tinggi.

Untuk menjangkau lokasi perkebunan dapat dilalui dengan jalan darat yang kondisinya cukup baik sejauh ± 25 Km dari kota Meulaboh ibukota kabupaten Aceh Barat dan lokasi berada ditepi jalan kabupaten yang kondisinya sudah diaspal. Menurut Pardamean (2008) salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pembangunan kebun kelapa sawit adalah ketersediaan infrastruktur terutama jalan, baik menuju lokasi maupun di dalam lokasi. Jalan yang baik menuju dan di dalam lokasi akan memudahkan transportasi keluar masuknya orang dan barang menuju lokasi termasuk memudahkan dalam transportasi produksi kelapa sawit dari kebun ketika panen kelapa sawit berlangsung.

Biaya Peremajaan

Peremajaan perkebunan kelapa sawit yang akan dilaksanakan seluas 400 Ha dimana pelaksanaannya dilakukan sekaligus. Kondisi ini memungkinkan untuk dilaksanakan karena lahan berada pada satu hamparan dan infrastruktur jalan menuju lokasi merupakan jalan kabupaten yang sudah di aspal. Mudahnya mobilisasi alat, orang dan barang untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan akan sangat membantu pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit. Secara keseluruhan total biaya peremajaan kebun kelapa sawit Kopermas Tuah Meusapat 400 Ha dan per Ha dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan Tabel 1 biaya Investasi peremajaan tanaman kelapa sawit Kopermas Tuan Meusapat secara keseluruhan atau 400 Ha berjumlah Rp. 24.000.000.000,- atau Rp. 60.000.000,- per Ha. Porsi pendanaan yang digunakan Rp. 10.000.000.000,- atau Rp. 25.000.000,- per Ha dari dana hibah BPDP Sawit (41,67 %) dan Rp. 15.000.000.000,- atau Rp. 35.000.000,- per Ha dari dana sharing petani (58,33 %). Perhitungan porsi seperti ini sesuai petunjuk untuk mendapatkan dana hibah peremajaan perkebunan kelapa sawit dari BPDP Sawit Indonesia. Rata – rata kebutuhan biaya peremajaan perkebunan kelapa sawit sampai dengan siap panen atau TM1 berdasarkan standar biaya Departemen Perkebunan Republik Indonesia sebesar Rp. 60.000.000,-. BPDP Sawit hanya membiaya peremajaan sebesar Rp. 25.000.000,- per Ha (41,67 %) karena menganggap petani sudah memiliki aset atau tabungan dari kebun yang sudah ada sehingga Rp. 35.000.000,- per Ha dari biaya peremajaan (58,33 %) harus disediakan oleh petani.

Tabel 1. Biaya Peremajaan, Porsi Pendanaan Hibah BPDP Sawit dan Dana sharing Petani Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Petani Kopermas Tuah Meusapat Per 400 Ha dan Per Ha.

URAIAN	TAHUN				JUMLAH PER 400 HA (Rp)	JUMLAH PER HA (Rp)
	2018	2019	2020	2021		
I. PRA INVESTASI	109,918,190				109,918,190	274,795,48
II. INVESTASI TANAMAN						
1. TBM - 0	10,524,114,349				10,524,114,349	26,310,286
2. TBM - 1		2,069,897,460			2,069,897,460	5,174,744
3. TBM - 2			2,437,620,000		2,437,620,000	6,094,050
4. TBM - 3				2,460,780,000	2,460,780,000	6,151,950
III. INVESTASI NON TANAMAN						
- Pekerjaan Sipil	4,655,270,000				4,655,270,000	11,638,175
- Gaji	435,600,000	435,600,000	435,600,000	435,600,000	1,742,400,000	4,356,000
JUMLAH INVESTASI PEREMAJAAN	15,724,902,539	2,505,497,460	2,873,220,000	2,896,380,000	24,000,000,000	60,000,000
SUMBER DANA HIBAH BPDP SAWIT					10,000,000,000	25,000,000
DANA SHARING PETANI					14,000,000,000	35,000,000
1 Skim - I						
Dana Hibah BPDP Sawit (1)	6,552,042,725	1,043,957,275	1,197,175,000	1,206,825,000	10,000,000,000	25,000,000
Sahring 100% Dana Petani (2)	9,172,859,814	1,461,540,185	1,676,045,000	1,689,555,000	14,000,000,000	35,000,000
Jumlah Skim - I (1+2)	15,724,902,539	2,505,497,460	2,873,220,000	2,896,380,000	24,000,000,000	60,000,000
2 Skim - II						
Dana Hibah BPDP Sawit (1)	6,552,042,725	1,043,957,275	1,197,175,000	1,206,825,000	10,000,000,000	25,000,000
Sharing 50 % Dana Petani (2)	4,586,429,907	730,770,093	838,022,500	844,777,500	7,000,000,000	17,500,000
Sharing 50 % Kredit Bank (3)	4,586,429,907	730,770,093	838,022,500	844,777,500	7,000,000,000	17,500,000
Bunga Bank 12 %/tahun (Anuitas) (4)	2,201,486,355	263,077,233	201,125,400	101,373,300	2,767,062,289	6,917,656
Pokok Kredit + Bunga Bank (5=3+4)	6,787,916,263	993,847,326	1,039,147,900	946,150,800	9,767,062,289	24,417,656
Beban Petani (6=5+2)	11,374,346,170	1,724,617,418	1,877,170,400	1,790,928,300	16,767,062,288	41,917,656
Jumlah Skim - II (6+1)	17,926,388,895	2,768,574,694	3,074,345,400	2,997,753,300	26,767,062,288	66,917,656
3 Skim - III						
Dana Hibah BPDP Sawit (1)	6,552,042,725	1,043,957,275	1,197,175,000	1,206,825,000	10,000,000,000	25,000,000
Sharing 100 % Dana Kredit Bank (2)	9,172,859,814	1,461,540,185	1,676,045,000	1,689,555,000	14,000,000,000	35,000,000
Bunga Bank 12 %/tahun (Anuitas)(3)	4,402,972,711	526,154,467	402,250,800	202,746,600	5,534,124,578	13,835,311
Pokok Kredit + Bunga Bank (4=2+3)	13,575,832,525	1,987,694,652	2,078,295,800	1,892,301,600	19,534,124,577	48,835,311
Beban Petani (5=4)	13,575,832,525	1,987,694,652	2,078,295,800	1,892,301,600	19,534,124,577	48,835,311
Jumlah Skim - III (5+1)	20,127,875,250	3,031,651,927	3,275,470,800	3,099,126,600	29,534,124,577	73,835,311

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2016)

Tujuan lain dari pembiayaan 58,33 % yang harus disediakan petani ini adalah untuk membangun rasa tanggung jawab dan jiwa memiliki kebun serta mendidik petani kelapa sawit menjadi petani mandiri dan profesional (Anonymous b, 2016), selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Warnaningsing (2011) menunjukkan bahwa rasa tanggung jawab dan jiwa memiliki yang tinggi seseorang terhadap suatu usaha akan mempengaruhi keberhasilan usaha kecil di kota Semarang. Dengan demikian tujuan proyek membebaskan dana sharing pada petani kelapa sawit adalah untuk menciptakan rasa tanggung jawab petani yang akhirnya diharapkan akan mendorong keberhasilan peremajaan kelapa sawit yang direncanakan.

Jadwal penarikan dana disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan. Penarikan pertama dilakukan pada tahun 2018 oleh karena rencana kegiatan dimulai pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 atau tanaman berumur 3 tahun menuju umur mulai berbuah. Selanjutnya dalam tahun kegiatan berjalan penarikan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemajuan pekerjaan. Proses penjadwalan penarikan dana ini dilakukan dalam rangka kontrol keuangan yang perlu dilakukan baik untuk kepentingan BPDP Sawit sebagai penyedia dana hibah, pihak perbankan sebagai penyalur kredit dan penyalur dana hibah. Penjadwalan ini juga penting bagi manajemen kebun untuk pengawasan per periode kegiatan,

pertanggung jawaban keuangan dan kemajuan kerja fisik kegiatan.

Menurut Sholeh (2014) ada tiga hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu proyek yaitu perencanaan, penjadwalan dan pengendalian proyek. Ketiga hal tersebut merupakan satu kesatuan yang harus dilaksanakan secara berurutan.

Selanjutnya Tampubolon (2005) dan Barry(2006) menyatakan bahwa penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan untuk mengurutkan dan membagi waktu untuk seluruh kegiatan proyek sehingga pekerjaan proyek lebih mudah dan tertata untuk dilaksanakan.

Pada penjadwalan penggunaan dana, baik yang bersumber dari hibah BPDP sawit maupun dari dana sharing petani berdasarkan skim pola yang ditawarkan tetap mengikuti penjadwalan yang disepakati dalam perencanaan proyek. Sebelum dana hibah diberikan dari BPDP sawit, petani harus menyediakan dana sharingnya pada bank negara yang ditunjuk. Sumber dana boleh murni atau 100 % dari dana petani, 50 % dana petani dan 50 % pinjaman bank atau 100 % pinjaman bank.

Pada perhitungannya dana hibah BPDP Sawit dalam 4 tahun atau selama masa peremajaan akan disalurkan Rp. 10.000.000.000, - per 400 Ha atau Rp. 25.000.000,- per Ha. Sedangkan untuk dana sharing dari petani Rp. 14.000.000.000,- per 400 Ha atau Rp. 35.000.000,- per Ha dengan pola skim penyediaan sebagai berikut :

- a. Skim-I 100 % dana langsung dari petani Rp. 35.000.000,- per Ha, maka total kebutuhan dana peremajaan Rp. 60.000,000,-;
- b. Skim-II 50 % dana langsung dari petani Rp. 17.500.000,- dan 50 %

dari kredit bank Rp. 17.500.000,- bunga bank anuitas selama masa konstruksi 12 % Rp. 6.917.656,-, maka total kebutuhan dana peremajaan Rp. 66.917.656,-.

- c. Skim-III dana petani 100 % dari kredit perbankan Rp. 35.000.000,- bunga bank anuitas selama masa konstruksi 12 % Rp. 13.835.311,-, maka total kebutuhan dana peremajaan Rp. 73.835.311,-.

Jika dilihat dari total biaya peremajaan yang harus ditanggung petani dari ke tiga Skim yang direncanakan menunjukkan bahwa semakin petani tidak memiliki dana sendiri maka akan semakin besar jumlah biaya yang ditanggungnya. Perincian biaya peremajaan yang direncanakan untuk peremajaan kebun kelapa sawit baik dana hibah BPDP maupun dana petani sendiri sebagaimana Tabel 2.

Tabel 2. Biaya Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Per Ha yang Menjadi Beban Petani

NO	URAIAN	JUMLAH DANA (Rp)	% BERDASAR DANA HIBAH BDPD
1	Dana Hibah BPDDP Sawit	25.000.000	0,00%
2	Skim-I Dana Petani (100%)	35.000.000	140,00%
3	Skim-II Dana Petani (50%) Pinjaman Bank (50%)	41.917.656	167,67%
	Skim-III Pinjaman Bank (100%)	48.835.311	195,34%

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2016)

Tabel 2. Menunjukkan bahwa jika porsi dana hibah BPDP Sawit yang dijadikan sebagai tolak ukur maka pada skim – I petani 100 % menggunakan

dana sendiri maka petani harus mengeluarkan dana Rp. 35.000.000,- atau 140,00 %, jika pada skim –II Rp. 41.917.656,- atau 167,67 % dan pada skim-III Rp. 48.835.311,- atau 195,34 %. Semakin besar pinjaman petani pada perbankan maka akan semakin besar beban biaya peremajaan kebun kelapa sawit yang harus ditanggung petani. Menurut Fitri (2016) bunga kredit merupakan pendapatan perbankan yang menjadi komponen biaya bagi penerima pinjaman, semakin besar pinjaman maka akan semakin besar bunganya yang akhirnya akan memperbesar total biaya yang harus dikeluarkan.

Dari Segi Pemasaran.

Asumsi harga jual TBS ke Pabrik yang digunakan dalam perhitungan sebesar Rp. 1.900,- yang merupakan rata – rata harga TBS dalam satu tahun terakhir, dengan trend harga 5 tahun terakhir ini dan perkiraan kebutuhan minyak sawit domestik dan internasional akan meningkat. Penetapan harga TBS di pabrik akan mengikuti harga CPO di pasar Internasional sehingga diperkirakan harga TBS akan tembus Rp. 2.000,- pada tahun 2021-2011 ketika kebun yang diremajakan mulai panen.

Menurut Mulyana (2007) penetapan harga CPO di dalam negeri sangat ditentukan oleh harganya di Kuala Lumpur dan Rotterdam dimana harga CPO di Rotterdam sangat terkait dengan situasi permintaan dan penawaran minyak kedelai sebagai bahan substitusi penting minyak goreng asal kelapa sawit. Produk akhir yang paling menentukan gejolak harga dalam industri kelapa sawit adalah harga minyak goreng. Harga minyak goreng merupakan acuan utama bagi harga CPO, selanjutnya harga CPO merupakan acuan utama bagi harga TBS petani. Selain itu harga pembelian TBS juga diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 627/Kpts.II/1998, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 395//Kpts/OT. 140/11/2005 dalam rumus harga TBS. Berdasarkan rumus harga pembelian tersebut yang menjadi komponen tertimbang adalah harga CPO lokal.

Analisa Keuangan.

Analisa keuangan dilakukan untuk menentukan apakah suatu proyek akan layak untuk dilaksanakan atau dibiayai secara finansial atau tidak. Adapun parameter yang dianalisa dan hasil analisisnya adalah sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3. Perkiraan NPV, B/C ratio, IRR, Payback Period dan BEP Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Kopermas Tuah Meusapat 400 Ha.

NO	URAIAN	NPV (Rp)	B/C RATIO	IRR (%)	Pay Back Period	BEP Produksi TBS (Kg)
1	Skim-I Dana Petani (100%)	31.667.790.000	2,42	23,26	8 Tahun 3 Bulan	12.631.579
2	Skim-II Dana Petani (50%) Pinjaman Bank (50%)	28.998.922.000	2,16	22,33	8 Tahun 9 Bulan	14.087.928
3	Skim-III Pinjaman Bank (100%)	15.547.978	1,56	18,33	10 Tahun 3 Bulan	15.544.278

Sumber : Data Penelitian (diolah, 2016)

Net Present Value (NPV).

Perhitungan nilai *Net Present Value* atau NPV dengan discount faktor

12 % sesuai perkiraan inflasi maksimum diperoleh nilai yang terbalik dimana semakin besar biaya proyek akan

semakin kecil NPV nya. Pada skim-I NPV Rp. 31.667.790.000,-; skim-II Rp. 28.998.992.000,-; dan skim-III Rp. 15.547.978.000,-. Keseluruhan angka ini menunjukkan nilai positif, dengan demikian jika ditinjau dari analisa NPV maka proyek layak untuk dilaksanakan karena pada df 12% jumlah pendapatan yang dihasilkan lebih besar dari jumlah pengeluaran.

Net Benefit Cost Ratio (Net BCR).

Perhitungan nilai Net B/C Ratio proyek yang diperoleh mengikuti kebalikan dari biaya investasi yang dikeluarkan, semakin besar investasi maka akan semakin kecil nilai B/C ratio. Pada skim-I B/C Ratio 2,41; skim-II 2,16; dan skim-III 1,56. Keseluruhan nilai B/C Ratio pada ke tiga skim lebih besar dari 1 maka proyek yang direncanakan layak untuk dilaksanakan karena proyek dapat memberikan output yang lebih besar dari input yang dimasukkan, atau proyek akan memberikan nilai benefit sejumlah nilai B/C Ratio dari tiap rupiah biaya yang dikeluarkan.

Internal Rate of Ratio (IRR).

Perhitungan nilai IRR proyek yang diperoleh juga mengikuti kebalikan dari biaya investasi yang dikeluarkan, semakin besar investasi maka akan semakin kecil nilai IRR nya. Pada skim-I IRR 23,26 %; skim-II 22,33 %; dan skim-III 18,33 %. Keseluruhan nilai IRR pada ke tiga skim lebih besar dari nilai df 12 % maka proyek direncanakan layak untuk dilaksanakan karena proyek akan memberikan keuntungan lebih besar dari bunga bank atau inflasi yang diperkirakan.

Pay Back kof Period.

Berdasarkan perhitungan *Pay Back Of Period* atau masa pulang pokok dapat diketahui bahwa masa *Pay Back Of Period* proyek mengikuti biaya investasi yang dikeluarkan, semakin besar investasi maka akan semakin lama masa pulang pokoknya.

Pada skim-I PBOP 8 tahun 3 bulan; skim-II 8 tahun 9 bulan; dan skim-III 10 tahun 3 bulan. Keseluruhan nilai PBOP pada ke tiga skim masih di bawah umur ekonomis proyek atau umur produktif tanaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan.

Break Evant Point

Perhitungan *Break Evant Point* atau titik pulang pokok yang dihitung adalah untuk produksi TBS. Berdasarkan perhitungan BEP produksi diketahui bahwa nilai BEP produksi mengikuti biaya investasi yang dikeluarkan, semakin besar investasi maka akan semakin besar BEP produksinya. Pada skim-I BEP 12.631.579 Kg TBS; skim-II 14.087.928 Kg TBS; dan skim-III 15.544.276 Kg TBS. Nilai BEP produksi pada masing-masing skim masih di bawah total produksi selama umur produktif tanaman, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proyek layak untuk dilaksanakan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Peremajaan kebun kelapa sawit petani Kopermas Tuah Meusapat seluas 400 Ha direncanakan menggunakan bantuan dana Hibah BPDP Sawit dan sharing dana petani, nilai hibah BPDP Sawit sebesar Rp. 25.000.000,- dan sharing dana petani Rp. 35.000.000,- per Ha dengan total kebutuhan fisik peremajaan kebun Rp. 60.000.000,- per Ha atau Rp. 25.000.000.000,-per 400 Ha.
2. Skim pendanaan menganut 3 pola antara lain :
 - a. Skim-I 100 % dana langsung dari petani Rp. 35.000.000,- per Ha, maka total kebutuhan dana peremajaan Rp. 60.000.000,- per Ha;

- b. Skim-II 50 % dana langsung dari petani Rp. 17.500.000,- dan 50 % dari kredit bank Rp. 17.500.000,- bunga bank anuitas selama masa konstruksi 12 % Rp. 6.917.656,-, maka total kebutuhan dana peremajaan Rp. 66.917.656,- per Ha.
 - c. Skim-III dana petani 100 % dari kredit perbankan Rp. 35.000.000,- bunga bank anuitas selama masa konstruksi 12 % Rp. 13.835.311,-, maka total kebutuhan dana peremajaan Rp. 73.835.311,- per Ha.
3. Ketiga pola skim pendanaan memiliki peluang yang sama untuk dilaksanakan tergantung pada kemampuan keuangan petani, namun pola skim-III yang paling besar biayanya.
 4. Secara kelayakan proyek berdasarkan kriteria NPV, IRR, B/C Ratio, Payback Period dan BEP Produk ke tiga skim layak dilaksanakan karena nilai – nilai perhitungannya berada di dalam pada kriteria kelayakan proyek.

Saran

1. Agar program peremajaan kebun kelapa sawit Kopermas Tuah Meusapat dapat terrealisasi maka pihak Koperasi perlu lebih aktif dan intensif dalam pengurusan pendanaan baik pada BPDP Sawit maupun pihak perbankan yang ditunjuk sebagai bank pelaksana.
2. Meskipun secara perhitungan kelayakan proyek layak dilaksanakan namun agar pelaksanaannya dapat berlangsung dengan baik maka perlu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sesuai dengan standar peremajaan kebun yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymous a, 2016, Mitos VS Fakta Industri Minyak Sawit Indonesia Dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global, Bogor, Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI).
- Anonymous b, 2016, Petunjuk Mendapatkan Dana Hibah Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, Jakarta, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP Sawit) – Indonesia Estate Corp Fund for Palm Oil / IECF Palm Oil
- Dishutbun Aceh Barat, 2015, Data Pokok Tanaman Perkebunan Kabupaten Aceh Barat, Meulaboh, Dishutbun Aceh Barat.
- Fahmi, Irham, 2014, Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- Fitri, M, 2016, Peranan Dana Pihak Ketiga dalam Kinerja Lembaga Pembiayaan Syariah dan Faktor – faktor yang Mempengaruhinya, Jurnal *Economica* Volume VII Edisi 1/Mei 2016, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo Semarang
- Jumingan, 2011. Studi Kelayakan Bisnis. Bumi Aksara. Jakarta
- Kashmir dan Jakfar. 2010. Studi Kelayakan Bisnis. Kencana Prenada Media. Grup. Jakarta
- Mulyana, A, 2007, Penetapan Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Sumatera Selatan dari Prespektif Pasar Monopoli Bilateral, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian dan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya, Palembang.

- Sholeh, MN, 2014, Peran Penjadwalan, dan Pengendalian dalam Kesuksesan Proyek Konstruksi, Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Kuliah Utama Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Manajemen Konstruksi Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro, Semarang
- Sutarta, E.S dan Rahutomo, S. 2010. New Standart for FFB Yield of IOPRI'S Planting Materials Based on Land Suitability Class. Medan. Indonesian Oil Palm Research Institute (IOPRI).
- Tampubolon, M, 2005, Manajemen Keuangan, Edisi Pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prawita, Desi, 2015, Bea Keluar dan Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya, Warta Bea Cukai, Volume 47, Nomor 9 September 2015.
- Warnaningsih, MK, 2011, Analisis Modernitas Sikap Kewirausahaan dan Hubungannya dengan Keberhasilan Unit Usaha Kecil Tahu Serasi Bandungan, Departemen Agribisnis IPB, Bogor.